

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku dan Sumber Lain:**

Diambil kembali dari ereport.ipb.ac.id:

<https://ereport.ipb.ac.id/id/eprint/278/4/J3N117206-04-Andika>  
Pendahuluan.pdf

Aditya, H., Ardiansyah, M., Sidik, & Gata, W. (2020). Pengelolaan Persediaan Pada Aplikasi SAKTI Menggunakan Algoritma First In First Out (FIFO). *Jurnal Informatika*, 174-188.

Antoro, S. D. (2017, Desember 21). *Pencatatan Persediaan Pemerintah: PERPETUAL atau PERIODIK?* Diakses tanggal 24 Maret 2022, dari [bppk.kemenkeu.go.id](https://bppk.kemenkeu.go.id): <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/sekretariat-badan-pencatatan-persediaan-pemerintah--perpetual-atau-periodik-2019-1105-c6f513f3/>

Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. (n.d.). *Sejarah KPPN Manado*. Diakses tanggal 21 Februari 2022, dari [kembali dari djpjb.kemenkeu.go.id](https://djpjb.kemenkeu.go.id): <https://djpjb.kemenkeu.go.id/kppn/manado/id/profil/sejarah.html>

Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *Jurnal At-Taqaddum*, 21-46.

Ibrahim, M. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. 1-4.

Kemenkeu RI. (t.thn.). *SAKTI Pelaporan*. Diakses tanggal 8 Maret 2022, dari Persediaan: <https://sites.google.com/view/saktipelaporan/persediaan>

Kementerian Republik Indonesia. (n.d.). *Daftar Eselon 1*. Diakses tanggal 3 April 2022, dari [kemenkeu.go.id](https://kemenkeu.go.id): <https://kemenkeu.go.id/single-page/daftar-eselon1/>

KPPN Manado. (2022). *Laporan Kinerja Tahun 2021 KPPN Manado*. Manado: KPPN Manado.

KPPN Manado. (t.thn.). *Profil Visi Misi Kanwil DJPb*. Diakses tanggal 11 Februari 2022, dari [djpjb.kemenkeu.go.id](https://djpjb.kemenkeu.go.id): <https://djpjb.kemenkeu.go.id/kppn/manado/id/profil/visimisi.html>

Kustiani, N. A., & Hamzah, A. P. (2014). *Buku Seri Akuntansi Pemerintah Dasar Dasar Akuntansi Pemerintah (Buku 1)*. Tangerang Selatan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Sampouw, R., & Elim, I. (2019). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Oleh APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Kota' Manado. *Jurnal EMBA*, 4301-4310.
- Sari, M., & Dahria, M. (2010). Analisis Sistem Persediaan dalam Akuntansi. *Jurnal Saindikom*.
- Suryanto. (2018). Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Agregasi*, 179-197.
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. (2009). *Accounting 23e*. Mason: LEAP Publishing Services.
- Yayasan Obor Indonesia. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2010a). *Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2010b). *Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2010c). *Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan*. Jakarta
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2010d). *Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan*. Jakarta
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2010e). *Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 012 tentang Laporan Operasional*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01 /2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan*. Jakarta

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar*. Jakarta

Kementerian Keuangan. (2019a). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. Jakarta

Kementerian Keuangan. (2019b). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat*. Jakarta